

RINGKASAN

Belanja modal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Pentingnya belanja modal dalam pembangunan daerah mendorong pemerintah pusat menetapkan kebijakan batas minimal alokasinya dalam APBD, yaitu sebesar 40 persen dari total belanja daerah setiap tahun. Namun, hingga kini masih banyak daerah yang belum memenuhi batas minimal tersebut. Salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada tahun 2022 hanya merealisasikan belanja modal sebesar 13 persen dari total belanja daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel keuangan dan nonkeuangan, seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan kemiskinan terhadap belanja modal, baik secara bersama-sama maupun secara parsial pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2023.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dilengkapi data dari Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk dari jurnal, publikasi, dan situs website daerah. Data yang diambil berupa data tahun 2011 hingga 2023 dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan serangkaian uji pemilihan model, antara lain Uji Chow dan Uji Hausman. Model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana perimbangan, SiLPA, dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2023. Secara parsial, variabel dana perimbangan dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal; sedangkan variabel pendapatan asli daerah dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengevaluasi anggaran daerah untuk meningkatkan porsi belanja pada sektor-sektor strategis, seperti penguatan infrastruktur pelayanan publik melalui belanja modal. Pengelolaan belanja modal juga perlu dilakukan secara lebih efektif dan responsif terhadap faktor nonkeuangan, sehingga alokasinya tepat sasaran dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik serta percepatan pembangunan daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu berupaya menurunkan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Kemiskinan.

SUMMARY

Capital expenditure plays an important role in driving regional economic growth through infrastructure development and the provision of public services. The importance of capital expenditure in regional development has prompted the central government to establish a policy of a minimum allocation in the regional budget, which is 40 percent of the total regional expenditure each year. However, until now, there are still many regions that have not met these requirements. One of them is the Special Region of Yogyakarta, which in 2022 only realized capital expenditure of 13 percent of the total regional expenditure.

This study aims to analyze the influence of financial and non-financial variables, such as original local government revenue, balancing funds, remaining budget balance, and poverty on capital expenditure, both jointly and partially, on district/city local governments in the Special Region of Yogyakarta Province from 2011 to 2023.

The type of research is quantitative research using secondary data obtained from the realization reports of the regional budget audited by the Financial Audit Agency and supplemented with data from the Central Statistics Agency, including journals, publications, and regional websites. The data collected consists of data from the years 2011 to 2023 from 5 regencies/cities in the Special Region of Yogyakarta Province. This research uses the panel data regression analysis method, which has undergone several tests, such as the Chow Test and the Hausman Test. The best model selected is the Fixed Effect Model (FEM).

The research results show that collectively, original local government revenue, balancing funds, remaining budget balance, and poverty significantly affect capital expenditure in the districts/cities of the Special Region of Yogyakarta Province from 2011 to 2023. Partially, the variables of balancing funds and remaining budget balance have a significant positive effect on capital expenditure; whereas the variables of original local government revenue and poverty do not have a significant effect on capital expenditure.

The implications of this research indicate that the district/city governments in the Special Region of Yogyakarta Province need to evaluate the regional budget to increase the spending portion on strategic sectors, such as strengthening public service infrastructure through capital expenditure. The management of capital expenditures also needs to be carried out more effectively and responsively to non-financial factors, so that the allocations are targeted and directly contribute to the improvement of public service quality and the acceleration of regional development. In addition, local governments also need to strive to reduce their dependence on transfer funds from the central government by optimizing sustainable local revenue sources.

Keywords: *Capital Expenditure, Original Local Government Revenue, Balancing Funds, Remaining Budget Balance, Poverty.*